

**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG ANTROPOLOGI AGAMA**

**MENGELOLA KERAGAMAN AGAMA
DI RUANG PUBLIK:
TANTANGAN PEMBANGUNAN NEGARA
BANGSA INDONESIA**



**OLEH:
ERNI BUDIWANTI**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2022**

**MENGELOLA KERAGAMAN AGAMA
DI RUANG PUBLIK:
TANTANGAN PEMBANGUNAN NEGARA
BANGSA INDONESIA**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2022 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG ANTROPOLOGI AGAMA**

**MENGELOLA KERAGAMAN AGAMA
DI RUANG PUBLIK:
TANTANGAN PEMBANGUNAN NEGARA
BANGSA INDONESIA**

**OLEH:
ERNI BUDIWANTI**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2022**

© 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Pusat Riset Kewilayahan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mengelola Keragaman Agama di Ruang Publik: Tantangan Pembangunan Negara Bangsa
Indonesia/Erni Budiwanti. Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

ix + 50 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-7425-99-1 (cetak)
978-623-8052-00-4 (e-book)




1. Antropologi agama
2. Hubungan mayoritas-minoritas
3. Kebijakan agama

261

Copy editor : Mayasuri Presilla
Proofreader : Risma Wahyu Hartiningsih & Dhevi E.I.R. Mahelingga
Penata Isi : Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : S. Imam Setyawan

Cetakan : September 2022



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id
 PenerbitBRIN
 Penerbit_BRIN
 penerbit_brin

BIODATA RINGKAS



Erni Budiwanti, Lahir di Singaraja-Bali, pada tanggal 28 Oktober 1960 adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak R. Pambudi dan Ibu Ni Luh Pastrri. Menikah dengan Drs. H. Saigun, dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Nur Lazuardini Makmur (1996), Nurul Hasanah Makmur (1997), dan Muhammad Anshori Makmur (2000). Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 203/M Tahun 2014 Tanggal 5 Desember 2014 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama terhitung mulai 30 Mei 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 281/I/HK/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato Pengukuhan Profesoer Riset.

Menamatkan Sekolah Dasar Negeri Kapas Krampung Wetan III di Surabaya tahun 1972, Sekolah Menengah Pertama Negeri IX di Surabaya tahun 1975, Sekolah Menengah Atas Negeri IX di Surabaya tahun 1979. Memperoleh gelar Sarjana Jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Master of Arts bidang Antropologi di Monash University Australia tahun 1989, dan gelar Ph.D. bidang Antropologi dari Monash University Australia tahun 1997.

Mulai bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1986,

dan bergabung ke dalam Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI pada tahun 2001. Pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Asia Pasifik di PSDR LIPI pada tahun 2009.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Peneliti Muda III/c pada tahun 2001, kemudian Peneliti Madya IV/a pada tahun 2009, dan Peneliti Ahli Utama IV/c pada tahun 2014.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, di antaranya sebagai tenaga pengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) (1 Februari 2004 sampai dengan 1 Maret 2008), dan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB (6 Juni sampai dengan Desember 2016).

Telah menghasilkan 42 karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan prosiding. Sejumlah 25 KTI di antaranya ditulis dalam bahasa Inggris.

Menerima tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2007), dan XXX Tahun (2016) dari Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS	v
PRAKATA PENGUKUHAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. SINKRETISME DAN GERAKAN PEMURNIAN AGAMA.....	4
III. DAMPAK MULTITAFSIR AJARAN: PERSEKUSI, PENGUNGS, DAN KONTROL ATAS RUANG PUBLIK	7
IV. KOEKSISTENSI DAMAI DALAM KEBINEKAAN.....	13
V. RELASI MAYORITAS-MINORITAS AGAMA: TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
5.1 Toleransi dan Intoleransi dalam Hubungan Intra-Agama dan Antar-Agama.....	18
5.2 Dari Klaim Kebenaran ke Klaim Geografis.....	19
5.3 Ruang Publik Inklusif Wahana Multikulturalisme	19
5.4 Otonomi Kebudayaan	20
VI. KESIMPULAN.....	21
VII. PENUTUP	23
UCAPAN TERIMA KASIH	25
DAFTAR PUSTAKA.....	29
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH.....	37
DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	46

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

“MENGELOLA KERAGAMAN AGAMA
DI RUANG PUBLIK:
TANTANGAN PEMBANGUNAN NEGARA
BANGSA INDONESIA”

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dibangun di atas landasan persatuan dan harmoni sosial dengan mosaik keragaman etnik dan agama di dalamnya. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi referensi nilai utama dalam mengelola keragaman. Kenyataannya, mengelola kemajemukan tidak hanya cukup mengandalkan jargon atau menampilkan simbol-simbol etnik-kedaerahan dalam konteks ritual atau seremonial, seperti peragaan busana daerah dari 34 provinsi pada peringatan hari kemerdekaan, hari Kartini, dan hari-hari bersejarah lainnya. Namun, bukan berarti kebanggaan pada kebinekaan nusantara dalam simbol-simbol eksternal atau penampilan luar ini tidak penting. Sebagai penanda identitas, kehadiran mereka pada momen budaya guna memeriahkan suasana dan menggelorakan semangat persatuan di atas kemajemukan sangat penting maknanya. Akan tetapi, sejauh manakah kebanggaan dan perayaan akan kemajemukan dengan identitas etnik-kedaerahan tersebut juga mengejawantah dalam perilaku nyata sehari-hari, khususnya dalam hubungan antaranak bangsa? Mengapa di beberapa wilayah tertentu di Indonesia aksi-aksi yang merusak kebinekaan dan persatuan semacam pengeboman gereja, pembakaran dan penyegelan masjid Ahmadiyah, dan perusakan vihara masih marak terjadi? Mengapa permusuhan antaretnik dan kerusuhan yang sarat artikulasi keagamaan masih mewarnai dinamika hubungan sosial dalam masyarakat plural? Kasus Aceh-Singkil^{1,2}, Tolikara^{3,4}, Tanjung Balai-Sumatra Utara⁵, Maluku^{6,7}, Poso^{8,9,10}, dan Papua¹¹ membuktikan rentannya persatuan yang dibangun di atas kebinekaan. Rentetan kekerasan yang menampakkan disharmoni dalam hubungan antarsuku, antaragama, serta antara penduduk asli dan pendatang (migran) jelas membuktikan bahwa mengelola kebinekaan tidak cukup hanya melalui semboyan indah *bhinneka tunggal ika* dan

peragaan simbol-simbol kultural (*cultural display*) saja. Bangsa Indonesia masih menghadapi masalah krusial dalam hal membumikan kebinekaan di dalam relasi-relasi sosial nyata baik di tingkat hubungan antarindividu maupun antarkelompok. Ancaman disharmoni dan disintegrasi lantaran perbedaan merupakan gejala serba hadir (*ubiquitous*), baik manifes maupun laten dalam masyarakat majemuk.

Potensi konflik dalam masyarakat heterogen bukan hanya terjadi antaragama saja, tetapi juga dalam hubungan intraagama, yakni antarkelompok seagama yang berbeda penafsiran ajaran. Antara Muslim-sinkretik yang mempertahankan adat leluhur di samping Islam berhadapan dengan kelompok Muslim yang lebih puritan. Misalnya, seperti Muslim abangan *vis-a-vis* santri¹², Wetu Telu *vis-a-vis* Waktu Lima^{13,14,15,16}. Kajian yang dilakukan Wazir-Jahan Karim di Malaysia¹⁷ dan oleh Maunati dan Rositasari tentang Muslim Cham di Kamboja¹⁸ memperlihatkan bahwa kaum Muslim sinkretik berhadapan dengan kaum puritan yang menampakkan wajah Islam yang lebih fundamental, kurang toleran terhadap nilai-nilai lokal-tradisional yang dipandang tidak selaras (*incompatible*) dengan Islam. Kemajemukan wajah Islam Indonesia juga terlihat dari berkembangnya berbagai aliran, yakni kelompok Sunni yang merupakan mayoritas dominan yang jumlah penganutnya terbesar di Indonesia, dan kelompok sektarian yang masuk dalam kategori minoritas, seperti Ahmadiyah, Syi'ah, dan pengikut agama lokal^{19,20,21,22}.

Di Asia Tenggara dan Asia Timur pluralitas etnik dan agama menghasilkan dilema hubungan mayoritas dan minoritas yang berkembang menjadi perjuangan memisahkan diri dan tuntutan kemerdekaan seperti Muslim Patani di Thailand^{23,24}; Bangsa Moro Filipina^{25,26,27}; Rohingya di Myanmar²⁸; OPM di Papua^{29,30}; GAM di Aceh³¹; serta Mongol³², Tibet, dan Uyghur di Cina.

Harmoni dan disharmoni merupakan dua kutub ekstrem yang mewarnai dinamika hubungan intraagama dan antar etnik-agama, dalam relasi antara mayoritas dan minoritas di tingkat lokal maupun regional.

Kemajemukan membelah dan menempatkan masyarakat dalam kategori mayoritas dan minoritas. Persekusi, diskriminasi, dan marginalisasi yang dialami Ahmadiyah³³ dan Syiah³⁴ di Indonesia serta Rohingya di Myanmar^{35,36,37} memberi gambaran wajah minoritas Indonesia yang menyedihkan (*sad picture*). Wacana akademik tentang minoritas pun banyak didominasi oleh gambaran yang memprihatinkan, karenanya patut dibela dan diperjuangkan kesetaraannya^{38,39}. Namun, gambaran ini bukanlah satu-satunya representasi wajah minoritas di Indonesia. Beberapa kelompok minoritas tertentu di Indonesia menempati posisi relatif menguntungkan. Mereka menikmati keminoritasannya dalam hubungan dengan mayoritas tanpa tekanan dan paksaan. Kajian ini berusaha mencermati sisi lain dari wajah minoritas Indonesia yang bisa hidup berdampingan dalam koeksistensi damai dengan mayoritas, seperti halnya minoritas Hindu-Bali di Lombok⁴⁰, minoritas Muslim India di Malaysia⁴¹, dan minoritas Sindhi⁴²—komunitas diaspora India di Indonesia. Mereka justru diuntungkan dengan posisi keminoritasannya dengan membentuk jaringan perdagangan yang menghubungkan tempat mereka bermigrasi (*new homeland*), Malaysia dan Indonesia, dengan tanah asalnya atau leluhurnya (*ancestral land*), India. Studi ini melihat minoritas dalam dua wajah yang berbeda, yaitu minoritas yang memiliki posisi kurang menguntungkan (*disadvantage position*) dan minoritas yang relatif mempunyai posisi menguntungkan (*advantage position*).

II. SINKRETISME DAN GERAKAN PEMURNIAN AGAMA

Pengakuan resmi pemerintah atas pluralitas agama di Indonesia hanya terbatas pada enam agama besar saja (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu), namun tidak bagi agama lokal dan sekte-sekte (Ahmadiyah dan Syiah) yang dianggap menyimpang dari Islam. Agama lokal adalah kepercayaan warisan leluhur yang lebih dulu berkembang secara turun-temurun, jauh sebelum kedatangan Islam. Tradisi nenek moyang yang bersinergi dengan Islam menghasilkan sinkretisasi keagamaan, misalnya komunitas adat 'Wetu Telu' di Lombok, dan 'Islam Abangan' di Jawa.

Awal Islamisasi ditandai dengan tidak adanya batasan yang tegas dan jelas (*unclear religious boundary*) antara Islam dan kepercayaan pra-Islam yang dikodifikasikan ke dalam adat istiadat⁴³. Cees van Dijk⁴⁴ menyebutkan: “Ketika Islam tersebar di Indonesia, Islam dihadapkan pada struktur sosial yang kompleks dan kepercayaan yang mengakar kuat. Islam menjadi agama resmi masyarakat-masyarakat ini, tetapi tidak terbukti mudah untuk menggeser kepercayaan dan kebiasaan lama.”

Perbedaan penafsiran dalam menyerap Islam dan domestifikasi Islam ke dalam struktur sosial, dan kultur setempat menyumbang keragaman wajah Islam Indonesia⁴⁵, sebagaimana pernyataan berikut. “... Islam di Indonesia sejak awal berinteraksi dengan konteks lokal untuk menghasilkan pelbagai variasi dalam kehidupan sosial, politik, dan agama. Kesatuan Islam yang ditekankan para pengikutnya ditunjukkan dengan baik di Indonesia, demikian juga keanekaragaman lokal yang telah banyak membantu memberikan sejarah Islam dan sejarah Indonesia dengan berbagai dinamika yang menjadi ciri khas keduanya.”⁴⁶.

Meskipun prinsip dasar universal yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menunjukkan perbedaan dengan Islam di tempat lain, domestifikasi Islam ke dalam *setting* sosiokultural yang spesifik, sampai batas tertentu, memberikan kontribusi signifikan terhadap pluralitas fenomena kehidupan Islam Indonesia⁴⁷. Islamisasi di Indonesia, bukan semata-mata proses mengadopsi nilai-nilai eksternal, tetapi juga menempuh adaptasi dengan nilai-nilai internal (budaya lokal). Islam menjadi identitas lokal yang ikut mewarnai dan diwarnai oleh kultur spesifik masyarakat setempat⁴⁸.

Komunitas-komunitas Muslim yang bertahan dengan adat istiadat mereka, seperti Wetu Telu di Lombok dan Suku Baduy dengan ajaran Sunda Wiwitan⁴⁹ di Banten kerap menjadi sasaran utama gerakan kembali pada kemurnian Al-Qur'an dan Hadis dengan anjuran meninggalkan bagian-bagian dari kepercayaan adat yang tidak selaras dengan Islam. Gerakan dakwah adalah upaya untuk membebaskan masyarakat Muslim dari segala macam ekspresi budaya lokal yang dianggap tidak relevan dengan Islam. Dalam pandangan Muslim Sasak, *adat beteken kon syari'at, syari'at beteken kon Kitabullah sareng sunnah* (adat bersandar pada syariat, dan syariat bersandarkan Kitab Allah dan sunnah). Merujuk dikotomi Redfield, Islam bisa dikatakan sebagai *Great Tradition* (Tradisi Besar) sementara kepercayaan adat setempat adalah *Little Tradition* (Tradisi Kecil)⁵⁰. Selaras dengan ini, Hefner⁵¹ berpendapat bahwa adat karena diciptakan oleh manusia, tidak bisa mengatasi atau menandingi Islam yang diturunkan berdasarkan wahyu Ilahi. Studi Hefner tentang masyarakat Tengger di Jawa Timur menegaskan: “Bagi Muslim modern, adat memiliki posisi yang lebih rendah dari agama, ciptaan manusia tidak dapat melampaui wahyu Allah.” Adat sebagai sesuatu yang dibangun manusia haruslah berkiblat ke agama wahyu (Islam), dan yang tidak sesuai dengan Islam harus di-

tinggalkan. Ini menjadi dasar mengapa para Tuan Guru, pencetus perubahan dan pembaharuan, berhadapan dengan pemuka adat. Dalam pandangan Tuan Guru hanya adat-adat yang menopang dan mempertegas syariat yang patut dan layak dipertahankan. Misalnya mengenakan *selewok* (sarung panjang), baju koko untuk menutup aurat, dan berpeci bila ke masjid. Begitu juga dengan adat *besalaman* (jabat tangan), *betabik* bila melewati orang yang duduk di bawah, dan *besilak* (mempersilakan lebih dulu) adalah bagian muamalah untuk menghormati dan berhikmat pada sesama.

Sebagian komunitas adat Wetu Telu Lombok belum mau mengubah keyakinan dan praktik adat istiadat, meskipun Tuan Guru dan pengikutnya mengembangkan program-program pengentasan kemiskinan, pemberantasan buta huruf melalui pendidikan cuma-cuma, membantu proyek air bersih, dan penghijauan. Mereka menghadapi penolakan kuat dari fungsionaris adat yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Wetu Telu. Bertahannya komunitas adat Wetu Telu membuktikan kuatnya pengaruh turun-temurun dari tokoh-tokoh adat di tengah gelombang re-islamisasi dan modernisasi. Ini memberi alasan dan motivasi kuat bagi juru dakwah untuk meneguhkan misi mereka. Pada hakikatnya gerakan dakwah memang merupakan proses sambung-sinambung yang dikembangkan di sepanjang mata rantai keilmuan dan keulamaan (*sanad*).

III. DAMPAK MULTITAFSIR AJARAN: PERSEKUSI, PENGUNGSI, DAN KONTROL ATAS RUANG PUBLIK

Keragaman wajah Muslim Indonesia bukan hanya ditandai oleh percampuran Islam dengan ragam varian tradisi lokal, melainkan juga oleh multitafsir ajarannya. Tidak adanya interpretasi tunggal (monolitik) dari ajaran Islam, di antaranya, tecermin dari berkembangnya berbagai ormas-ormas Islam dengan perbedaan hilafiah, semisal NU, Muhammadiyah, HTI, Al Irsyad, Salafi, dan Jamaah Tabligh.

Ajaran tentang siapa yang dianggap sebagai nabi dan rasul terakhir melahirkan konflik penafsiran antara mayoritas Sunni dan Ahmadiyah. Kelompok pertama meyakini finalitas Muhammad, yang berarti tidak ada lagi utusan Tuhan setelah Rasulullah Muhammad (*laa nabiya ba'da*). Beliau Muhammad saw. diyakini sebagai penutup para nabi (*khotamun nabiiyyin*). Sebaliknya, Ahmadiyah memercayai bahwa pasca-Rasulullah Muhammad saw., pintu kenabian tetap terbuka yang bermakna ada nabi lain setelah Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad dipercaya sebagai *nabi dzili* (*silhouette* atau bayangan dari Nabi Muhammad) yang tidak membawa syariat baru, tetapi hanya melanjutkan syariat (yang diwahyukan pada) Nabi Muhammad. Tipologi kenabian menurut versi Ahmadiyah mendorong diterbitkannya fatwa sesat oleh Rabithah al Islami yang diikuti oleh MUI Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti SK Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001 yang melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah⁵².

Klimaks dari klaim kesesatan yang dilegitimasi dengan fatwa adalah serial kekerasan yang berakhir dengan terusnya Ahmadi dari wilayah tinggal, dan terpaksa menetap di pengung-

sian sampai waktu yang tidak ditentukan. Kekerasan sosial yang sarat artikulasi keagamaan juga dialami Syiah Sampang-Madura yang sampai kini terpaksa harus menetap di asrama Puspo Agro, Sidoarjo, sebagai tempat pengungsian yang diberikan oleh Pemda Jatim. Belum terwujudnya rencana relokasi setelah masa pengungsian yang relatif panjang bagi Ahmadiyah di asrama Transito Mataram-NTB (2006–2021) dan Syiah di Wisma Jemuno, Sidoarjo-Jawa Timur (2012–2021) memperkuat kesan 'pembiaran' di lokasi pengungsian dan menjadikannya sebagai katup penyelamat (*safety valve*) untuk mencegah berulangnya konflik fisik di tanah asal⁵³.

Pengusiran minoritas agama adalah artikulasi klaim kebenaran ke dalam *setting* geografis. Ruang fisik dimaknai secara keagamaan, kelompok arus utama (*mainstream*) memonopoli teritorial atas dasar keyakinan beragama dengan mempertontonkan sikap tidak sudi berbagi ruang hidup dengan mereka yang dianggap “sesat dan menyesatkan”. Klaim teritorial menjadi semacam mekanisme pertahanan identitas kelompok arus utama. Memelihara lingkungan tempat tinggal dari infiltrasi ajaran Ahmadiyah dan Syiah menjadi alasan utama pengusiran dan pelarangan pengungsi dari kedua sekte minoritas ini kembali ke kampung halaman sebelum bertobat. Kekhawatiran bahwa anggota Ahmadiyah dan Syiah akan menyebarkan ajaran mereka dan memperoleh pengikut baru yang lebih banyak, menyebabkan anggota kedua sekte ini terhalang untuk bisa kembali ke daerah asal⁵⁴.

Dilema kemajemukan beragama muncul bukan karena ragam perbedaan penafsiran ajaran, melainkan ketika baku klaim antarkeyakinan berkembang menjadi klaim kebenaran yang dipaksakan oleh arus utama. Persekusi berlanjut tatkala pemaksaan ideologi agama menjadi klaim ruang geografis atas wilayah tinggal⁵⁵.

Ketidakberdayaan minoritas agama dalam ruang kontestasi teologis membuat mereka kehilangan hak-hak dasarnya. Tidak hanya kehilangan hak tempat tinggal dan terpaksa menetap di pengungsian, mereka pun tidak memiliki jaminan keamanan jika ingin melakukan mobilitas keluar. Stigma kesesatan yang menjadi sumber pemicu kerusuhan yang tetap melekat adalah salah satu faktor yang menahan mereka untuk kembali ke kampung halaman. Jika diizinkan kembali pun, dipastikan tidak ada yang melindungi dari penyerangan massal.

Kelompok arus utama keagamaan bukan hanya memegang monopoli kebenaran, melainkan juga memonopoli ruang publik. Mereka melarang aliran agama yang difatwakan sesat untuk mengekspresikan identitas di ruang publik. Di tingkat kebijakan, intoleransi di ruang publik tecermin dari UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama⁵⁶, SKB 3 Menteri No. 3, tahun 2008. Dalam tataran perilaku kolektif, sikap intoleran terlihat dari penutupan, penyegelan, dan perusakan rumah ibadah Ahmadiyah.

Dinamika kemajemukan di Indonesia ditandai oleh penguasaan ruang publik secara eksklusif atas nama keyakinan oleh kelompok arus utama keagamaan. Di sini ruang publik adalah atmosfir fisik dan sosioreligius yang mengartikulasikan kebenaran agama di pihak *mainstream* saja. Bagi minoritas penganut agama yang disesatkan, kebutuhan akan ruang fisik seperti lingkungan tempat tinggal, dan ruang keagamaan seperti mempertahankan tempat ibadah dengan segala aktivitas di dalamnya, sangat dibatasi.

Habermas⁵⁷ adalah pencetus pertama konsep ruang publik. Menurutnya, ruang publik adalah sebuah domain dalam kehidupan sosial, yaitu tempat opini publik dapat dibentuk dan berkembang di antara warga negara yang berurusan dengan

hal-hal yang menyangkut kepentingan umum (*public interest*)—yang mereka miliki dan hadapi bersama tanpa perlu mendapatkan tekanan dari negara (pemerintah) dalam mengekspresikan dan memublikasikan pandangan-pandangan mereka. Ruang publik yang sehat dalam gagasan Habermas adalah cerminan masyarakat emansipatif yang bebas dari dominasi, di mana setiap orang memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kunci utama dalam ruang publik adalah interaksi tatap muka dan dialog antarindividu untuk membentuk opini publik dan mewujudkan kepentingan bersama. Ruang publik yang kuat, menurutnya, dibutuhkan untuk menjamin tercapainya demokrasi, yang di dalamnya berkembang asas keadilan, keberagaman, kebebasan berekspresi menyampaikan opini, kesetaraan, dan solidaritas.

Dalam masyarakat majemuk, ruang publik idealnya menjadi ruang inklusif, yang bukan sekadar mempertemukan siapa saja dengan berbagai latar budaya dan agama, melainkan dia juga menjadi ruang ekspresi keragaman identitas, yang menghidupkan kultur toleransi dan harmoni mutual di dalamnya^{58,59}. Di sini setiap individu bebas menyalurkan kreativitasnya sepanjang tidak mengganggu atau mengambil hak yang lain.

Ruang publik dalam pemikiran Habermas tidak hanya berlaku dalam konstelasi politik, tetapi dapat dimaknai dan diterapkan pula dalam domain yang lebih luas, mencakup ruang budaya. Ruang budaya menjadi lokus untuk mengekspresikan kemajemukan varian nilai-nilai agama dan kultur. Singkat kata, kita memerlukan ruang kebinekaan yang mampu mewedahi, memberikan *equal access and opportunity* bagi setiap aspirasi dan kepentingan dari masing-masing kelompok identitas.

Eksklusivisme di ruang publik khususnya dalam peribadatan dan pola perkawinan yang dipertahankan Ahmadi, makin

memperlebar jarak sosial mereka dengan arus utama. *Religious distancing* ini tecermin dari tidak berbaurnya Ahmadi dalam salat berjamaah dengan non-Ahmadi di masjid Jami' di sekitar wilayah tempat tinggal, baik sebelum maupun setelah mengungsi. Tidak berimam pada non-Ahmadi dalam peribadatan merupakan instruksi dari pendiri Jamaah Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, yang diteruskan pada khalifah. Sikap ini sesuai dengan butir ke-6 dari 10 butir baiat Jamaah Ahmadiyah, yaitu “akan mengikat tali persaudaraan dengan Imam Mahdi dan Al Masih Mau'ud semata-mata karena Allah, taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mati dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi”.

Kontrol ruang publik oleh kelompok arus utama keagamaan yang dominan bukan hanya satu-satunya faktor yang membuat minoritas agama tersisih dan termarginalkan. Salah satu alasannya adalah tidak ada jaminan keamanan, seperti tidak bakal di-*bully* atau diserang apabila salat di masjid umum. Sebagian pengungsi masih menyimpan trauma tentang amuk massa dan serangan mendadak. Ini adalah kelompok rentan kekerasan yang menyangang stigma sesat.

Kecenderungan mempertahankan perkawinan dengan sesama penganut dan menolak perkawinan dengan orang luar adalah cara untuk memelihara kemurnian ajarannya. Ritual peribadatan dan perkawinan yang eksklusif sangat tidak kondusif bagi tumbuh kembangnya ruang pembauran antaragama (*inter-religious space*). Mengatasi perbedaan nilai dengan menutup diri terhadap batas-batas perbedaan (*closing the religious boundary*) dengan cara membentuk kantong agama yang terpisah dari komunitas *liyan*, menjadikan Ahmadiyah target mudah penyerangan massal. Dalam hal-hal tertentu Ahmadi pun menampilkan sikap intoleran terhadap arus utama.

Resistensi sosial dan ideologis terhadap ajaran sekte minoritas, semacam Ahmadiyah, terwujud dalam bentuk penolakan hak-hak sipil yang menjadi dasar kewarganegaraan, seperti sebagaimana dijelaskan di atas, hak memilih tempat tinggal dan memiliki rumah ibadah. Penolakan ini diperkuat dengan sikap-sikap keberagaman kalangan minoritas yang relatif kurang membaur dengan kelompok arus utama. Dinamika kehidupan masyarakat plural dari segi relasi intra agama ditandai oleh adanya penolakan mutual.

IV. KOEKSISTENSI DAMAI DALAM KEBINEKAAN

Di satu sisi, kemajemukan berpotensi memicu konflik, di sisi lain, keragaman juga menumbuhkan toleransi mutual dan koeksistensi damai antaretnik-agama. Kasus minoritas Hindu Bali dan mayoritas Sasak Muslim di Lingsar, Lombok Barat, misalnya sama-sama memberikan penghormatan pada situs keramat, *Kemaliq*, sesuai dengan keyakinan masing-masing (*one sacred site with different venerated figures*)⁶⁰. Keduanya secara bergiliran maupun bersama-sama dalam spot yang berjarak, memanfaatkan situs keramat menurut versi penanggalan tradisional, detail ritual, dan pemimpin upacara masing-masing. Perbedaan memaknai situs keramat menurut keyakinan masing-masing membenarkan Vickers⁶¹ yang menyatakan: “Dalam tradisi lisan biasanya ada variasi legenda tentang asal usul komunitas. Adanya variasi perbedaan dan ketidaksesuaian antarnarasi lokal bermakna bahwa cerita yang berbeda dapat digunakan dalam konteks yang berbeda pula.” Bagi Muslim Sasak sumber mata air di *Kemaliq* Lingsar adalah petilasan Wali Raden Mas Sumilir, seorang penebar Islam. Adapun bagi Hindu Bali mata air *Kemaliq* adalah representasi simbolik dari Bethara Wisnu, dewa kesuburan dan kemakmuran.

Setiap tahunnya Hindu Bali dan Muslim Sasak melakukan ritual Perang Topat di *Kemaliq* Lingsar dengan menggunakan ketupat sebagai senjata. Saling lempar ketupat di antara keduanya merupakan inti acara, yang secara simbolik dimaknai sebagai pesan perdamaian atas permusuhan masa lalu antara kerajaan Karangasem-Bali yang menguasai sebagian besar wilayah Lombok Barat dan penduduk asli (Sasak) yang menggalang pemberontakan lokal^{62,63}.

Di samping mata air, situs makam keramat menjadi objek ziarah bagi kedua etnik-agama ini seperti makam Medane di Tanjung-Lombok Utara dan makam Pancor Wali Denek di desa Batu Kumbang Lombok Barat. Meski sebagian kelompok Muslim Ortodoks menentang keras tradisi ziarah wali yang melibatkan kelompok lain agama, makam ini tetap dibanjiri oleh peziarah, baik dari dalam maupun luar Lombok. *Shared sacred landscape* atau berbagi wilayah keramat memperkuat argumen Keith Basso⁶⁴ dalam *Wisdom Sits in Places* yang mengungkapkan bahwa “tempat memiliki makna yang dalam dan sering kali merupakan metafora untuk memahami dunia sosial kita dan praktik-praktik sosial yang kita kerjakan”.

Pertukaran sosial dalam perilaku kolektif untuk saling berbagi ruang dan waktu serta dalam cara dan perilaku ritual keagamaan yang berbeda antara Hindu Bali dan Muslim Sasak mempertegas asumsi Cheleen Mahar⁶⁵ yang mengemukakan bahwa “keberadaan manusia tertanam dalam ruang dan waktu, dan kehidupan sosial kita terletak dalam pertukaran dari bentuk simbolik di mana kita tinggal”. Bentuk pertukaran simbolik (*symbolic exchange*) adalah saling menunjukkan sikap damai dan toleran, dalam arti tidak saling berebut maupun saling mengklaim paling berhak atas tempat sakral. Masing-masing kelompok keagamaan tetap menjaga identitas keyakinan masing-masing tanpa perlu merasa lebih benar, atau paling benar dalam hubungan dengan kelompok lain dalam memperlakukan dan menghormati situs-situs keramat.

Jumlah masyarakat Hindu Bali di Lombok hanya sekitar kurang dari 3% dibandingkan Sasak yang 90% dari sekitar tiga juta penduduk Lombok. Sebagai minoritas pendatang, Hindu Bali sangat menikmati kebebasan beribadah, bahkan di lokasi yang dikeramatkan oleh Muslim Sasak, yaitu petilasan wali.

Keleluasaan mengekspresikan keyakinan di ruang publik terjadi pula di saat mereka memperingati Nyepi, ratusan Ogoh-Ogoh (boneka raksasa lambang buta kala) diarak dan diiringi gamelan melewati jalan-jalan protokol di kota Mataram⁶⁶. Begitu pula ketika perayaan tahun baru Cina, Cina Konghucu, Buddha, dan Kristen menyatu dengan mayoritas penonton, yakni Sasak Muslim. Semua menikmati atraksi tarian barongsai di jantung kota Mataram. Kesemuanya ini adalah aktualisasi dari penguatan ritual agama dan budaya bagi etnik-agama minoritas di ruang publik.

Di tahun 2017 ketika atraksi Ogoh Ogoh di Lombok jatuh pada hari Jumat, rombongan pengusung Ogoh-Ogoh beserta pembawa gamelan memulai prosesi setelah Muslim turun dari masjid. Pawai Ogoh-Ogoh juga berhenti sekejap di jalan, sembari mematikan gamelan setiap kali azan didengungkan, dan bergerak lagi seusai azan. Ini adalah salah satu bentuk toleransi yang ditunjukkan minoritas Hindu pada mayoritas Muslim di Lombok⁶⁷.

Identitas lahir karena adanya perbedaan. Kesadaran akan adanya perbedaan muncul tatkala individu atau kelompok berhadapan dengan anggota atau kelompok *liyan* dalam proses interaksi dan pertukaran sosial. Dalam masyarakat majemuk, sebagian kelompok berupaya memelihara identitas masing-masing (*as a distinct group with a separate identity*). Ini dilakukan bukan hanya dengan memberlakukan batasan-batasan sosio-keagamaan bagi anggota-anggotanya saja, melainkan juga meluaskan skala berlakunya pembatasan tersebut (*extended religious restrictions*)⁶⁸ pada kelompok *liyan*. Masyarakat adat menjadi sasaran target dari gerakan pemurnian agama oleh Muslim ortodoks. Minoritas Muslim yang hidup di tengah mayoritas Hindu di Bali, mengalami restriksi sosio-keagamaan

ketika umat Hindu memperingati Nyepi dengan memberlakukan *catur brata: amati geni* (tanpa penerangan), *amati karya* (tidak bekerja), *amati lelungan* (tidak bepergian), dan *amati lelangunan* (tidak bersuara keras). Akibatnya, minoritas Muslim di Bali tidak diizinkan menggunakan pengeras suara di masjid untuk mendengarkan azan dan harus berjalan kaki menuju masjid. Mereka tidak boleh takbiran keliling kota di kala Nyepi bertepatan dengan malam lebaran. Sebaliknya, minoritas Hindu Bali yang hidup di lingkungan mayoritas Muslim di Lombok pun mengalami berbagai restriksi sosial dalam pembangunan tempat ibadah, pemakaman, menjalankan prosesi pengabenan, dan berjualan makanan di ruang publik (*open public space*) di siang hari tatkala Ramadan⁶⁹. Dihadapkan dengan stimulan dari luar, masing-masing kelompok menunjukkan persistensi dan toleransi dalam *setting* kontekstual yang berbeda.

Intoleransi lebih tampak dalam hubungan intra-agama, khususnya antara Ahmadiyah dan Sunni, atau antara Islam Syiah dan Sunni. Masyarakat Muslim Sasak relatif lebih toleran terhadap penganut agama yang berbeda sama sekali. Ekspresi dari mosaik sosio-budaya di ruang publik memberi gambaran tentang hidupnya toleransi dan harmoni mutual di antara umat yang berbeda agama. Minoritas memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk penguatan identitas etnik-keagamaan di ruang publik. Pengakuan kolektif (*collective recognition*), baik mayoritas Muslim Sasak maupun pemerintah di Lombok, bahwa minoritas etnik-agama memiliki identitas tersendiri yang patut dijaga. Adanya pengakuan ini memfasilitasi kebebasan berekspresi di ruang publik.

Tidak dimungkiri bahwa di luar Lingsar, hubungan Bali dan Sasak diwarnai pula dengan konflik dan ketegangan^{70,71,72,73}. Hal ini menunjukkan bahwa relasi mayoritas-minoritas dalam

masyarakat plural tidak monolitik atau satu arah. Dinamika hubungan sosial di antara keduanya berjalan di sepanjang garis kontinum, antara integrasi dan konflik. Salah satu menggantikan yang lain dalam *setting* waktu dan isu yang berbeda.

V. RELASI MAYORITAS-MINORITAS AGAMA: TINJAUAN KONSEPTUAL

5.1 Toleransi dalam Hubungan Antar-Agama dan Intoleransi dalam Hubungan Intra-Agama

Heterogenitas keyakinan memengaruhi hubungan intra dan antar-agama yang relatif kompleks. Kelompok arus utama Muslim mengembangkan resistansi dan intoleransi terhadap sekte-sekte Islam yang dianggap menyimpang dan keluar dari Islam oleh fatwa MUI. Pluralitas aliran keagamaan mengundang konflik berkepanjangan di tataran ideologis, bahkan juga fisik. Sebaliknya, yang sama sekali berbeda agama (Hindu Bali, Cina-Buddha, Konghucu, dan Kristen) justru relatif bisa hidup berdampingan. Negosiasi untuk mengelola bersama situs-situs keramat, tanpa kehilangan identitas masing-masing adalah wujud toleransi dan koeksistensi damai di antara mereka. Dengan demikian, wajah minoritas dalam hubungannya dengan mayoritas tidak senantiasa kelam karena tidak menjadi subjek diskriminasi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sebagaimana dialami minoritas agama, seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Tidak bisa dimungkiri bahwa di tempat lain hubungan antaragama juga banyak diwarnai kontestasi dan permusuhan yang berkepanjangan. Ini justru menunjukkan bahwa gambaran relasi mayoritas-minoritas tidak hanya satu wajah (*single face*), tetapi juga *multi-faces*. Hubungan mayoritas-minoritas dalam masyarakat plural sangatlah dinamis dan terjalin di sepanjang garis kontinum antara harmoni dan disharmoni, toleran dan intoleran.

5.2 Klaim Kebenaran yang Berkembang Menjadi Klaim Teritorial

Klaim kebenaran di ruang publik dalam hubungan intra-keagamaan membelah masyarakat plural ke dalam kategori kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok *mainstream* keagamaan sekaligus juga merupakan kelompok mayoritas yang dominan *vis-a-vis* minoritas yang berposisi tidak menguntungkan. Dalam titik ekstrem hubungan yang tidak seimbang tecermin dari terabaikannya hak-hak sipil anggota sekte minoritas untuk bebas memilih dan memiliki wilayah tinggal di mana pun di tanah air. Monopoli kebenaran oleh kelompok arus utama menciptakan masalah pengungsi agama di kalangan minoritas agama. Kelompok arus utama menghendaki wilayah tinggal yang bebas, bersih dari kesesatan, dan menentukan prasyarat utama bagi pengungsi agar bertobat, kembali ke keyakinan yang benar, sebelum kembali ke tanah asal. Homogenisasi penafsiran ajaran menurut standar kelompok arus utama keagamaan adalah pemaksaan yang berpotensi melenyapkan kebinekaan berkeyakinan.

5.3 Ruang Publik Inklusif Wahana Multikulturalisme

Pemikiran Habermas tentang ruang publik dapat diaplikasikan dalam lingkup agama dan budaya. Ruang publik menjadi sarana yang memfasilitasi kebebasan berekspresi bagi setiap kelompok keagamaan, tak terkecuali minoritas. Kelompok minoritas agama memperoleh kesempatan dan akses yang sama untuk memanfaatkan ruang publik sebagai wahana penguatan identitas kultural-keagamaan masing-masing. Temuan ini melegitimasi asumsi Barth⁷⁴ yang menjelaskan bahwa

- 1) Batas-batas budaya dapat bertahan meskipun kelompok-kelompok etnik tersebut saling berbaur dan saling terhubung. Perbedaan antaretnik ditentukan oleh terjadinya

pembauran, kontak, dan pertukaran informasi serta oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan. Perbedaan etnik tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran dan keanggotaan di antara unit-unit tersebut.

- 2) Pembauran mengembangkan interaksi sosial yang mantap, bertahan lama, dan penting antara dua kelompok etnik yang berbeda. Ciri-ciri masing-masing kelompok etnik bukan ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi berdasarkan pada terbentuknya sistem sosial tertentu dalam interaksi itu.

5.4 Otonomi Kebudayaan

Bali dan Sasak meskipun berbeda secara etnik-keagamaan, mampu menciptakan mekanisme sosiokultural tersendiri yang menjembatani toleransi mutual antara keduanya, tanpa perlu campur tangan pemerintah. Ritual yang diulang setiap tahun melibatkan kebersamaan di antara keduanya dan dihayati dengan versi keyakinan masing-masing. Hal ini adalah konstruksi sosial (*social construction*)⁷⁵ dan tradisi yang diciptakan (*invented tradition*)⁷⁶, dan bebas dari intervensi dan keterlibatan pemerintah.

VI. KESIMPULAN

Isu utama dalam negara bangsa yang pluralistik, seperti Indonesia, adalah ketegangan antara dua variabel: keragaman (*diversity*) dan kesatuan (*unity*). Kesatuan relatif tidak mudah diwujudkan dalam konteks kebinekaan. Ini karena penekanannya pada kesatuan dan homogenisasi yang berfungsi mengatasi, bukan melenyapkan keberagaman. Pada awalnya, penyatuan melalui upaya homogenisasi—menjembatani perbedaan dalam kemajemukan—berada di bawah pengawasan sentralistis rezim otoritarian Orde Baru. Homogenisasi yang dilakukan secara otoriter dan adanya pemaksaan hanya akan melahirkan toleransi yang dipaksakan dari luar, bukan bersumber dari kesadaran yang *genuine* dari lubuk hati individu yang bersangkutan.

Seiring reformasi yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru, demokratisasi pun bergulir, di antaranya berwujud tuntutan otonomi daerah yang menandai kebebasan untuk menghidupkan keberagaman. Justru setelah ruang kebebasan terbuka semenjak reformasi, tafsiran dan pemaknaan baru bagi *bhinneka tunggal ika* sangat diperlukan.

Konflik yang mengatasnamakan agama sebagai bagian dinamika keberagaman, menjadi kendala dan rintangan utama dalam memelihara kebinekaan dan rasa persaudaraan sebangsa. Apalagi konflik ini telah berkembang menjadi persekusi dan perlakuan diskriminatif terhadap 'penganut agama minoritas' dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia. Mereka dihakimi dan dihukum karena keyakinannya. Hukuman tersebut menafikan hajat hidup untuk memilih tempat tinggal dan memenuhi hak-hak dasar lainnya sebagai manusia.

Ruang publik idealnya dikembangkan menjadi ruang untuk berbagi sehingga setiap orang dan kelompok memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia di dalamnya. Ruang publik adalah ruang yang idealnya dihidupkan dan difungsikan di atas landasan prinsip kebebasan yang setara bagi siapa saja yang memanfaatkannya tanpa ancaman dan tekanan. Ruang publik menampung aneka ragam simbol-simbol atribut sosio-budaya dan keagamaan dari setiap kelompok untuk saling menguatkan identitas masing-masing.

Ide negara bangsa dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, memberi kelonggaran bagi setiap warga bangsa untuk mengekspresikan kebinekaan di dalam ruang publik. Pemerintah dengan penduduk yang memiliki agama dan budaya yang beragam diharapkan bersikap netral, tidak hanya berpihak atau membela salah satu kelompok saja. Ini karena negara dan Pemerintahan Republik Indonesia merupakan representasi dari semua kelompok dan golongan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib berdiri di atas semua golongan agama, etnik, dan ras. Dalam kerangka ini sangat relevan mengutip pidato Presiden RI I, Ir. Soekarno pada tahun 1955: “Negara ini, negara Republik Indonesia, bukan milik kelompok, agama, suku, atau kelompok yang memiliki adat istiadat tertentu, melainkan milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.”⁷⁷ Intinya Presiden Soekarno mengklaim semua yang tinggal di dalam wilayah Indonesia memiliki hak yang sama dan tidak ada satu kelompok pun yang memperoleh perlakuan lebih istimewa dibandingkan lainnya.

VII. PENUTUP

Kita menyadari betul bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk mengatur rumpun bangsa yang terbelah ke dalam kategori etnik dan agama yang sangat majemuk. Kita harapkan pemerintah menciptakan dan menerapkan kebijakan publik yang adil, setara, dan seimbang. Kebijakan yang sama-sama mengayomi kelompok mayoritas dan minoritas sifatnya vital. Ini bermakna bahwa kebebasan beragama bukan hanya hak milik mayoritas. Minoritas agama perlu mendapatkan ruang dan akses yang sama untuk mengekspresikan keyakinan mereka dengan aman di ruang publik, tanpa adanya tekanan dan intimidasi.

Ruang publik dalam masyarakat majemuk idealnya merepresentasikan kehidupan bersama dalam koeksistensi damai, yang di dalamnya setiap warga negara yang berbeda keyakinan tidak merasa terancam dan terpinggirkan hak-hak sipil, ekonomi, dan politiknya lantaran kehadiran suatu sistem kepercayaan yang dominan dengan jumlah penganutnya jauh lebih besar. Oleh karena itu, di dalam merumuskan kebijakan publik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan asas keadilan atas dasar kesetaraan dengan tidak mengabaikan aspirasi dan kepentingan minoritas agama.

Di tataran masyarakat sipil perlu disosialisasikan kesadaran hukum yang menjunjung dan menghargai perbedaan dalam prinsip kesetaraan, agar tidak menjadi tirani mayoritas, seperti main hakim sendiri, mengadili, dan menghukum kelompok minoritas agama atas dasar monopoli kebenaran. Sosialisasi tentang kebebasan agama yang bertanggung jawab, yang tidak memaksakan keyakinan secara sepihak, perlu ditekankan pula. Di samping pemerintah, semua usaha untuk mengatasi masalah

minoritas agama perlu dukungan dari lembaga-lembaga lain, seperti ormas-ormas Islam, NGO, dan *stake holder* lainnya yang memperjuangkan HAM dalam iklim keadilan dan kesetaraan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah jua pada akhirnya saya dapat merampungkan orasi ini. Naskah orasi ini hanyalah langkah permulaan untuk melewati tahapan berikut yang lebih besar dan menantang dalam pencarian jati diri saya di dalam kancah penelitian dan pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan-Nya dalam proses penelusuran ini, dan memberkati orang-orang yang melingkupi dan mendukung usaha ini.

Di hari bahagia ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua yang sangat berjasa dalam upaya mewujudkan naskah orasi ini. Secara khusus ucapkan terima kasih saya tujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.; Sekretaris Utama BRIN, Dr. Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.; Sekretaris Majelis Pengukuhan; Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani, Tim Penelaah naskah orasi ilmiah yang terdiri dari Prof. Dr. Endang Turmudi, Prof. Dr. Yekti Maunati, dan Prof. Dr. Koeswinarno sehingga pembacaan naskah ini terlaksana. Ucapan terima kasih saya tujukan pula kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani; Kepala Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Dr. Fadjar Thufail, M.A.; Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI (2015–2021), Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.; Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI (2016–2021), Prof. Dr. Ganewati Wuryandari; Plt. Kepala BOSDM BRIN, Ratih Retno Wulandari, S.Sos., M.Si.

Penghargaan tinggi juga saya sampaikan kepada beberapa peneliti senior LIPI: Prof. Dr. Taufik Adullah, Dr. CPF Luhulima, Prof. Dr. Mochtar Pabottingi, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Prof. Dr. Indria Samego, Prof. Dr. Erwiza Erman, dan Prof. Dr. Herman Hidayat yang telah memberikan motivasi, dorongan, dan masukan-masukan inspiratif sehingga menjadi ide dasar penulisan orasi.

Ucapan terima kasih saya teruskan pada staf pengajar dan pembimbing akademik di Department of Anthropology, Monash University, Clayton, Australia yang mengawali pembangunan minat dan karier saya di bidang Antropologi Budaya dan Agama. Beliau di antaranya adalah Prof. Dr. Ken Young, Prof. Dr. Joel S. Kahn, Prof. Don Miller, Dr. Rashmi D., Prof. Dr. Michael Stevenson, dan Prof. Dr. Penny Graham. Tak lupa teman-teman seangkatan dan kakak kelas yang menjadi *sparring partner* dalam diskusi dan pengembangan wacana di Monash: (alm.) Prof. Dr. Bambang Pranowo, Fachri Ali, M.A, Prof. Dr. Siri Gamage, dan Prof. Dr. Greg Fealy saya menyatakan rasa syukur terdalam atas pertemanan dan kesediaan berbagi berbagai sudut pandang. Untuk kolega yang memiliki ketertarikan yang sama yaitu menekuni dan mengembangkan studi Antropologi Bali dan Lombok sekaligus menjadi mitra kerja dan pembimbing di lapangan, Prof. David Harnish dari Universitas Sandiego, Dr. Kari Telle dari Chr Michelsen Institue-Norway, dan Dr. Volker Gottowik dari University of Heidelberg saya sampaikan banyak terima kasih atas berbagi pengalaman di lapangan. Rasa syukur juga saya tujukan untuk rekan-rekan peneliti di Pusat Riset Kewilayahan BRIN. Dan juga yang banyak membantu secara administratif berbagai penugasan saya dan dalam proses kenaikan jenjang fungsional dan golongan: (almarhum) Dra. Dini Saptari, (almarhum) Dra. Made Subaliati, Teguh Ambari, M.SI, Yudho Utomo, M.Si., Caroline Telaumbanua, Monic, In-

dah, dan Lala. Semoga Allah memberikan balasan rahmat yang melimpah, amin.

Teriring rasa syukur dan terima kasih tak terhingga pada para informan yang menjadi *local resources* untuk menggali lebih banyak dan lebih dalam lagi berbagai khazanah pengetahuan lokal (*local knowledge*). Di antara mereka adalah Pemangku Adat Bayan Agung, (almarhum) Bapak Raden Singadria, (almarhum) Bapak R. Gondakusuma, R. Asjanom, R. Gedarip, Ketut Toya, Bapak Ahmad Kandali, Pak Sahidin, Bapak Salehudin, Bapak Mangku Suparman, (almarhum) Tuan Guru Haji Safuan Hakim, TGH. Muharror, TGH Mukhlis, Ustaz Najamuddin, dan Ustaz Ketut Daimuddin Hasyim. Penghormatan juga saya berikan pada mereka yang telah berbagi informasi namun tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

Rasa syukur yang terdalam saya tujukan pada kedua orangtua saya: (almarhum) Bapak R. Pambudi dan (almarhumah) Ibunda Ni luh Pastri, melalui limpahan kasih sayang, doa-doa, perjuangan keras beliau berdua, telah berjasa menjadikan sebagaimana keadaan saya sekarang ini. Ibu dan Bapak memiliki latar belakang etnik berbeda dan sejak awal telah mengajarkan sikap menghargai 'perbedaan dalam kebersamaan hidup'. Dalam kesempatan ini saya juga menyatakan syukur yang tidak terhingga atas peran suami yang banyak melengkapi catatan etnografi dan peran pendampingan dari anak-anak: Nur Lazuardini Makmur, dr. Nurul Hasanah Makmur, dan M. Anshori Makmur untuk berbagi rasa dalam suka dan duka.

Rasa terima kasih tak terhingga kepada staf Penerbit BRIN yang memfasilitasi proses pengeditan dan penerbitan naskah orasi ini. Kepada semua sahabat yang tak dapat disebutkan satu per satu, atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya, saya sampaikan pula peng-

hargaan tertinggi kepada Majelis Profesor Riset dan para hadirin sekalian yang dengan segala kelapangan hati telah mengikuti acara pengukuhan ini dengan saksama. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu, saudara, dan sahabat berikan kepada saya dengan balasan yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Zain A. The Relation of the majority and minority of religious people in Aceh Singkil. Budapest International Research and Crisis Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences. 2019; 2(2): 56–65.
2. Ahmad HA. Resolusi konflik keagamaan di Aceh Singkil dalam perspektif budaya dominan. Jurnal Multikultural dan Multireligius. 2016; 15(3): 45–59.
3. Nurlaela. Analisis framing pemberitaan konflik Tolikara pada harian Kompas dan Republika [Skripsi]. [Jakarta]: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah; 2016.
4. Sunaryanto, Fachrul AF. Semiotika berita kerusuhan Tolikara di media online. Gandiwa Jurnal Komunikasi. 2021; 1(2): 24–40.
5. Hartanta IM. Analisis konflik dan solusi pemolisian dalam konflik antar agama di Tanjung Balai Sumatera Utara tahun 2016. Jurnal Ilmu Kepolisian. 2017; 11(1): 9.
6. Al Qurtuby S. Ambonese muslim jihadists, Islamic identity, and the history of christian-muslim rivalry in the Moluccas, Eastern Indonesia. International Journal of Asian Studies. 2015; 12(1): 1–29.
7. Al Qurtuby S. Christianity and militancy in Eastern Indonesia: Revisiting the Maluku violence. South East Asian Studies. 2015; 4(2): 313–339.
8. Schulze KE. “The Ethnic” in Indonesia’s communal conflicts: Violence in Ambon, Poso, and Sambas. Journal of Ethnic and Racial Studies. 2017; 40(12): 2096–2114.
9. Aragon LV. Communal violence in Poso, Central Sulawesi: Where people eat fish and fish eat people. Cornell University Press. 2001; 72.

10. Mc Rae D. A few poorly organised man: Interreligious violence in Poso, Indonesia. Leiden, Boston: Brill; 2013.
11. Noor F. Analisa terhadap kebijakan pemerintah tentang separatisme Papua. *Jurnal Pertahanan*. 2016; 16(3): 19–45.
12. Geertz C. The religion of Java. Chicago: University of Chicago Press; 1960.
13. **Budiwanti E.** The purification movement in Bayan, North Lombok: Orthodox Islam vis-à-vis religious syncretism. Dalam: Schaublin BS and Harnish DD, editor. *Between harmony and discrimination: Negotiating religious identities within majority-minority relationships in Bali and Lombok*. Leiden- Netherlands: Brill; 2014.
14. **Budiwanti E.** Islam dalam konteks budaya lokal: Studi kasus di Bayan, Lombok Barat. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 2005; 31(2).
15. **Budiwanti E.** The impact of Islam on the religion of the Sasak in Bayan, West Lombok. *Kultur*. 2001; 1(2), 34–67.
16. **Budiwanti E.** Religion of the Sasak: An ethnographic study on the impact of Islamisation the Wetu Telu of Lombok [Ph.D Thesis]. [Australia]: Department of Anthropology and Sociology, Monash University; 1997.
17. Karim WJ. *Women and culture: Between Malay adat and Islam*. Boulder Colorado-USA: Westview Press; 1992.
18. Maunati Y, Sari BR. Construction of Cham identity in Cambodia. *Suvannabhumi Journal of Southeast Asian Studies*. 2014; 6(1): 107–136.
19. Sirait AM, Nafisa F, Jatmiko RS. Posisi dan reposisi kepercayaan lokal di Indonesia. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 2015; 8(1): 25–37.
20. **Budiwanti E.** Islam and local culture: An interplay. *Strategic Review-The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs*. 2017; 7(2).

21. Burhani AN. Melintasi batas identitas dan keserjanaan: Studi tentang Ahmadiyah di Indonesia. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 2017; 16(2): 200–220.
22. Burhani AN. Treating minorities with fatwas: a study of the Ahmadiyya community in Indonesia. *Contemporary Islam*. 2014; 8(3): 285–301.
23. **Budiwanti E**. Forced cultural assimilation and it's implication for the continuation of Pattani Muslim's identity. Dalam: Budiwanti E, editor. *Multiculturalism, separatism, nation state building in Thailand*. Jakarta: Research Center for Regional Resources, Indonesian Institute of Sciences; 2004.
24. Brown D. From peripheral communities to ethnic nations: Separatism in Southeast Asia. *Pacific Affairs*. 1988; 61(1): 51–77.
25. **Budiwanti E**, Pamungkas C. Pendahuluan. Dalam: Budiwanti E, editor. *Multikulturalisme, separatisme dan pembentukan negara bangsa di Filipina*. Jakarta: PS DR-LIPI; 2003. 1–16.
26. **Budiwanti E**. Gerakan pembebasan Moro dan perjanjian damai. Dalam: Budiwanti E, editor. *Multikulturalisme, separatisme, dan pembangunan negara bangsa di Filipina*. Jakarta: PS DR-LIPI; 2003. 91–115.
27. **Budiwanti E**, Pamungkas C. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam: Budiwanti E, editor. *Multikulturalisme, separatisme dan pembentukan negara-bangsa di Filipina*. Jakarta: PS DR-LIPI; 2003. 121–126.
28. **Budiwanti E**. Minoritas muslim di Filipina, Thailand, dan Myanmar: Masalah represi politik. Dalam: Sihbudi R, editor. *Problematika minoritas muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani dan Rohingya*. Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewillayahan-LIPI; 2000.
29. La Pona. Penduduk, otonomi khusus, dan fenomena konflik di Tanah Papua. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2008; 3(1): 51–67.

30. Williams M. Organisasi Papua Merdeka: The Free Papua Movement lives. *Critical Asian Studies Bulletin of Concerned Asian Scholars*. New York: Routledge; 1987: 32–43.
31. **Budiwanti E**, Syamsumardam. Aceh: Otonomi atau merdeka? Dalam: Haris S, editor. *Indonesia di ambang perpecahan: Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya dan Timor Timur*. Jakarta: Erlangga; 1999.
32. **Budiwanti E**. Inner Mongolians swinging in dual identities: A dilemma of creating a multicultural atmosphere. Dalam: Yuniarto PR, editor. *Multiculturalism and nation state building in China*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute for Sciences; 2006.
33. **Budiwanti E**. Jama'ah Ahmadiyah and the ulama edicts. *Strategic Review-The Indonesian Journal of Leadership, Policy, and World Affairs*. 2011; 1(2): 89–96.
34. **Budiwanti E**. Implikasi perkembangan Syi'ah dalam kehidupan politik umat Islam di Indonesia. Dalam: Zainuddin AR, Basyar MH, editor. *Syah dan politik di Indonesia*. Bandung: Mizan; 2000.
35. **Budiwanti E**. The Military Junta's policies towards the Rohingya Muslim minority in Arakan. Dalam: Yuniarto PR, editor. *Multiculturalism, separtism and nation building in Burma*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute for Sciences; 2005. 67–86.
36. **Budiwanti E**. The fate of Rohingya under the Military Junta: multiculturalism revisited. Dalam: Yuniarto PR, editor. *Multiculturalism, separtism and nation building in Burma*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute for Sciences; 2005.
37. **Budiwanti E**. Nestapa muslim Rohingya. *Hidayatullah*. 2006; II(XVIII): 72–78.
38. Burhani AN. *Menemani minoritas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2019.

39. Yosarie I, Insiyah S, Buntara SA. Inklusi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Keindonesiaan. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara; 2021.
40. **Budiwanti E.** Spiritual dynamics of Balinese in Lombok: Sacred site and holy water. Dalam: Ardhana K, Trisila S, editor. Buku persembahan untuk Prof. Anak Agung Gede Putra Agung. Denpasar-Bali: Universitas Udayana, Fakultas Sastra; 2013.
41. **Budiwanti E.** Malaysian Indian Muslims' oscillating identity: Swinging in between home and host countries. Proceeding Report on the Work of the 2009/2010 Association of Public Intellectual (API) 9th Batch Fellow. Kyoto: The Japan Foundation; 2011.
42. Myutel M. Minority and advantage: The story and Sindhis in Indonesia. Dalam: Fealy G, Ricci R, editor. Contentious belonging: The place of minorities in Indonesia. Singapore: ISEAS; 2019. 214–231.
43. Ricklefs MC. A history of modern Indonesia. London: Mcmillan Education Ltd.; 1981.
44. van Dijk C. Islam and socio-political conflict in Indonesian history. *Social Compass*. 1984; 30 (1): 5–25.
45. Hirji, Zufikar, editor. Diversity and Pluralism in Islam. Historical and Contemporary Discourses amongst Muslims. London & New York: I.B.Tauris Publishers; 2009.
46. **Budiwanti E.** Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima. Yogyakarta: LkiS; 2000
47. **Budiwanti E.** ReIslamizing Lombok: Contesting the Bayanese Adat. *Masyarakat Indonesia*. 2011; 37(2): 85–114.
48. Wahab AJ, Fakhruddin F. Menakar efektivitas SKB tentang Ahmadiyah: Sudi kasus konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur. *Harmoni*. 2019; 18(1): 443–459.
49. Hakiki, KM. Keislaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Sunda Wiwitan. *Refleksi*. 2015 April; 4(1): 25–54.

50. Redfield TR. *The little community and peasant society and culture*. Chicago: The University of Chicago Press; 1956.
51. Hefner RW. *Hindu Javanese Tengger tradition and Islam*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press; 1985.
52. **Budiwanti E.** Potret kekerasan sosial terhadap Ahmadiyah sebagai persoalan kebangsaan dan ketahanan sosial. Dalam: Pamungkas C, editor. *Mereka yang terusir: Studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor; 2017.
53. **Budiwanti E.** Jemaah Ahmadiyah dan resistensi sosial di Lombok. *Harmoni: Jurnal multikultural dan multireligius*. 2007; 6(23).
54. **Budiwanti E.** Dilema memelihara kebebasan dan kerukunan beragama. Dalam: Pamungkas C, editor. *Meredam permusuhan, memadamkan dendam: Pelajaran bina damai dan ketahanan minoritas keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2019.
55. **Budiwanti E.** Pengungsi Ahmadiyah dan kendala rekonsiliasi sosial. Dalam: Pamungkas C, editor. *Studi tentang pengungsi dan relokasi Ahmadi di Mataram dan Syi'ah di Sidoardjo*. Jakarta: Buku Obor; 2018.
56. Telle, K. Faith on trial: Blasphemy and 'lawfare' in Indonesia. *Ethnos: Journal of Anthropology* 2018; 83(2): 371–391.
57. Habermas, J. *The theory of communicative action: Reason and the razionalization of society*. Boston: Beacon Press; 1984.
58. Supartiningsih. *Pandangan Jurgen Habermas tentang ruang publik (public sphere) dalam kaitannya dengan pluralitas agama [Disertasi S3]*. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat; 2012.
59. Calhoun C, editor. *Habermas and the public sphere*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology; 1992.

60. **Budiwanti E.** Food fight: Negotiating ethno-religious differences in West Lombok. *Journal of Strategic Review*. 2013; 3(1): 18–24.
61. Vickers A. Hinduism and Islam in Indonesia: Bali and the Pasisir World. *Indonesia*. 1987; 44: 31–58.
62. **Budiwanti E.** Religion and public sphere: Revisiting Balinese religious tradition in the island of thousand mosques. *Religion, Culture & State Journal*. 2021; 1(1): 1–21.
63. Harnish DD. *Bridges to the ancestors: Music, myth and cultural politics at an Indonesian Festival*. Honolulu: University of Hawai'i Press; 2006.
64. Basso KH. *Wisdom sits in places: Landscape and language among the Western Apache*. Albuquerque: University of New Mexico Press; 1996.
65. Mahar C. Review of wisdom sits in places: Language and landscape in the Western Apache. *The Journal for Education, Communities, and Values* 2003; 3(1): 1–4.
66. **Budiwanti E.** Pawai Ogoh-Ogoh dan Nyepi di Pulau Seribu Masjid: Penguatan identitas agama di ruang publik. *Harmoni*. 2018;17(2): 208–27.
67. **Budiwanti E.** Lombok: Religion in the public sphere. *Strategic Review*. 2019 October-December; 9(4): 49–53.
68. **Budiwanti E.** Maintaining identity and inter-religious tolerance: Case studies of Hindu minority in Lombok and muslim minority in Bali. Dalam: Bamualim CS, Helmanita K, Fauzia A, Kusnadinigrat E, editor. *Communal conflicts in contemporary Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta and The Konrad Adenauer Foundation; 2002. 43–66.
69. **Budiwanti E.** *The Crescent behind the thousand holy temples: An ethnographic study of the minority muslims of Pegayaman, North Bali*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 1995.

70. **Budiwanti E.** Mempertahankan identitas dan toleransi antar agama: minoritas muslim di Bali dan minoritas Hindu di Lombok. Konflik komunal di Indonesia saat ini. Series INIS XLI; 2003.
71. **Budiwanti E.** Balinese minority versus Sasak majority: managing ethno-religious diversity and disputes in western Lombok. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*. 2014; 3(2): 233–50.
72. Muktiwibowo S. *Semberbak dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, integrasi, dan resolusi konflik Hindu-Muslim*. Jakarta: Kencana; 2013.
73. Telle K. 1 Changing spiritual landscapes and religious politics on Lombok. Dalam: Hauser-Schäublin B, Harnish DD, editor. *Between harmony and discrimination: Negotiating religious identities within majority-minority relationships in Bali and Lombok*. Brill; 2014. 35–60.
74. Barth F. *Ethnic groups and boundaries: The social organisation of culture difference*. Long Grove, Illinois: Laveland Press; 1969.
75. Berger PL. *The social construction of reality: A treatise into sociology of knowledge*. London: Penguin Books; 1991.
76. Hobsbawm E, Ranger T, editor. *The invented of tradition*. United Kingdom: Cambridge University; 1983.
77. Vatikiotis. *Blood and silk: Power and conflict in modern South-east Asia*. London: Weidenfeld & Nicholson; 2017. 157.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku Nasional

1. **Budiwanti E.** When Local Meets Global: Religion, Ritual, and Contestation in Lombok. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi; 2021.
2. **Budiwanti E.** Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima. Yogyakarta: LKiS; 2000.
3. **Budiwanti E.** The crescent behind the thousand holy temples: An ethnographic study of the minority muslims of Pegayaman, North Bali. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 1995.

Bagian dari Buku Internasional

4. **Budiwanti E.** The purification movement in Bayan, North Lombok: Orthodox Islam vis-à-vis religious syncretism. Dalam: Schaublin BS, Harnish DD, editor. Between harmony and discrimination: Negotiating religious identities within majority-minority relationships in Bali and Lombok. Leiden- Netherlands: Brill; 2014.
5. **Budiwanti E.** Portrait of inter-ethnic relations in Sambas, Western Kalimantan, Indonesia. Dalam: Aguilar CT, editor. Ethnicity: Socio-cultural and economic challenges. Philippine: IFSSO-International Federation of Social Sciences Organization; 2007.

Bagian dari Buku Nasional

6. **Budiwanti E.** Dilema memelihara kebebasan dan kerukunan beragama: Kasus Ahmadiyah di Jawa Barat. Dalam: Pamungkas C, editor. Meredam permusuhan, memadamkan dendam: Pelajaran Bina Damai dan Ketahanan Minoritas Keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil. Jakarta: Obor; 2019.
7. **Budiwanti E.** Pengungsi Ahmadiyah dan kendala rekonsiliasi sosial. Dalam: Pamungkas C, editor. Studi tentang pengungsi dan relokasi Ahmadi di Mataram dan Syi'ah di Sidoardjo. Jakarta: Buku Obor; 2018.

8. **Budiwanti E.** Sekularisasi dan kebebasan beragama di Inggris: Kasus Ahmadiyah Pakistani. Dalam: Mudzakir A, Gusnelly, Budiwanti E, Mulyasari PN, editor. Menuju masyarakat pasca sekuler: Agama dan kewarganegaraan di Inggris. Yogyakarta: Penerbit Ombak; 2018.
9. **Budiwanti, E.** Potret kekerasan sosial terhadap Ahmadiyah sebagai persoalan kebangsaan dan ketahanan nasional. Dalam: Pamungkas C, editor. Mereka yang terusir: Studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syi'ah di Indonesia. Jakarta: Buku Obor; 2017.
10. **Budiwanti E.** Spiritual dynamics of Balinese in Lombok: Sacred site and holy water. Dalam: Ardhana K, Trisila S, editor. Buku persembahan untuk Prof. Anak Agung Gede Putra Agung. Denpasar-Bali: Universitas Udayana, Fakultas Sastra; 2013.
11. **Budiwanti E.** Inner Mongolians swinging in dual identities: A dilemma of creating a multicultural atmosphere. Dalam: Yuniarto PR, editor. Multiculturalism and nation state building in China. Jakarta: Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute for Sciences; 2006.
12. **Budiwanti E.** The Military Junta's policies towards the Rohingya Muslim minority in Arakan. Dalam: Yuniarto PR, editor. Multiculturalism, separtism and nation building in Burma. Jakarta: Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute for Sciences; 2005. 67–86.
13. **Budiwanti E.** The fate of Rohingya under the Military Junta: Multiculturalism revisited. Dalam: Yuniarto PR, editor. Multiculturalism, separtism and nation building in Burma. Jakarta: Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute for Sciences; 2005.
14. **Budiwanti E.** Forced cultural assimilation and its implication for the continuation of Pattani Muslim's identity. Dalam: **Budiwanti E**, editor. Multiculturalism, separatism, nation state building in Thailand. Jakarta: Research Center for Regional Resources, Indonesian Institute of Sciences; 2004.

15. **Budiwanti E**, Pamungkas C. Pendahuluan. Dalam: **Budiwanti E**, editor. *Multikulturalisme, separatisme dan pembentukan negara bangsa di Filipina*. Jakarta: PSDR-LIPI; 2003. 1–16.
16. **Budiwanti E**. Gerakan pembebasan Moro dan perjanjian damai. Dalam: Budiwanti E, editor. *Multiculturalism, separatism, and nation-state building in Thailand*. Jakarta: PSDR-LIPI; 2003. 91–115.
17. **Budiwanti E**, Pamungkas C. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam: Budiwanti E, editor. *Multikulturalisme, separatisme dan pembentukan negara-bangsa di Filipina*. Jakarta: PSDR-LIPI; 2003. 121–126.
18. **Budiwanti E**. Mempertahankan identitas dan toleransi antar-agama: Minoritas muslim Wetu Telu di Lombok dan Bali. Dalam: Asy'ari S, Vredenburg J, van Donzel E, Djamel M, Ruslan, Fauzia A, editor. *Konflik komunal di Indonesia saat ini*. Jakarta: INIS & Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah; 2003.
19. **Budiwanti E**. Maintaining identity and inter-religious tolerance: Case studies of Hindu minority in Lombok and muslim minority in Bali. Dalam: Bamualim CS, Helmanita K, Fauzia A, Kusnadinigrat E, editor. *Communal conflicts in contemporary Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta and The Konrad Adenauer Foundation; 2002. 43–66.
20. **Budiwanti E**. Respons masyarakat Indonesia terhadap masalah muslim di Bosnia, Kosovo, dan Chechnya. Dalam: Basyar H, editor. *Indonesia dan problematika muslim di Bosnia, Kosovo, dan Chechnya*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI; 2001.
21. **Budiwanti E**. Implikasi perkembangan Syi'ah dalam kehidupan politik umat Islam di Indonesia. Dalam: Zainuddin AR, Basyar MH, editor. *Syiah dan Politik di Indonesia*. Bandung: Mizan; 2000.
22. **Budiwanti E**, Syamsumardam. Aceh: Otonomi atau merdeka? Dalam: Haris S, editor. *Indonesia di ambang perpecahan: Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya dan Timor Timur*. Jakarta: Erlangga; 1999.

Jurnal Internasional

23. **Budiwanti E.** Lombok: Religion in the public sphere. *Strategic Review-The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs.* 2019; 19(4).
24. **Budiwanti E.** Islam and local culture: An interplay. *Strategic Review-The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs.* 2017; 7(2).
25. **Budiwanti E.** Localized Islam in Lombok: Wali, sacred sites, and ziarah tradition. *Strategic Review-The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs.* 2015; 5(4): 36–43..
26. **Budiwanti E.** Food fight: Negotiating ethno-religious differences in West Lombok. *Strategic Review-The Indonesian Journal of Leadership, Policy, and World Affairs.* 2013; 3(1): 18–24.
27. **Budiwanti E.** Jama'ah Ahmadiyah and the ulama edicts. *Strategic Review-The Indonesian Journal of Leadership, Policy, and World Affairs.* 2011; 1(2): 89–96.

Jurnal Nasional

28. **Budiwanti E.** Pawai Ogoh-Ogoh dan Nyepi di Pulau Seribu Masjid: Penguatan identitas agama di ruang publik. *Harmoni.* 2018; 17(2): 208–27.
29. **Budiwanti E.** The cultural display of Maulud in Lombok: The interplay of Islam and local adat. *Harmoni.* 2017; 16(1): 7–23.
30. **Budiwanti E.** Adat, Islam, and dakwah movement in Bayan, North Lombok. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage.* 2016; 2(1): 73–92.
31. Hakam S, Pamungkas C, **Budiwanti E.** Komodifikasi agama-agama di Korea Selatan. *Jurnal Kajian Wilayah.* 2016; 7(2): 159–68.
32. **Budiwanti E.** Balinese minority versus Sasak majority: Managing ethno-religious diversity and disputes in western Lombok. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage.* 2014; 3(2): 233–50.

33. **Budiwanti E.** The role of wali, ancient mosques, and sacred tombs in the dynamics of Islamisation. *Heritage of Nusantara: Journal of Religious Literature and Heritage*. 2014; 3(1): 17–46.
34. **Budiwanti E.** Re-Islamizing Lombok: Contesting the Bayanese Adat. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 2011; 37(2): 85–114.
35. **Budiwanti E.** Jemaah Ahmadiyah dan resistensi sosial di Lombok. *Harmoni: Jurnal multikultural dan multireligius*. 2007; 6(23).
36. **Budiwanti E.** Nestapa Muslim Rohingya. *Hidayatullah*. 2006; II(XVIII): 72–78.
37. **Budiwanti E.** Islam dalam konteks budaya lokal: Studi kasus di Bayan, Lombok Barat. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 2005; 31(2).
38. **Budiwanti E.** The impact of Islam on the religion of the Sasak in Bayan, West Lombok. *Kultur*. 2001; 1(1): 34–67.
39. **Budiwanti E.** Religious education and muslims identity in Pegayaman, Bali. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 1992; 19 (1).

Laporan Proceeding

40. **Budiwanti E.** The display of maulud in Lombok: Islam and local cultural practices. *Proceeding Report on International Symposium on Religious Literature and Heritage*; 2015.
41. **Budiwanti E.** Malaysian Indian Muslims' oscillating identity: Swinging in between home and host countries. *Proceeding Report on the Work of the 2009/2010 Association of Public Intellectual (API) 9th Batch Fellow*. Kyoto: The Japan Foundation; 2011.
42. **Budiwanti E.** The role of wali and sacred tomb in the dynamics of Islam in Lombok. *Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XIII, Mataram*; 18–21 November 2013.

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

Makalah

1. **Budiwanti E.** Jama'ah Ahmadiyah dan kebebasan agama di Inggris. Makalah disampaikan dalam The second ICSSH-International Conference on Social Sciences and Humanities. Jakarta: LIPI; 23–25 Oktober 2018.
2. **Budiwanti E.** Negotiating sacred water sites at Lingsar and Tragtag of West Lombok: Defining Balinese and Sasak intercultural relationships. Makalah disampaikan dalam International Seminar on Bali Hinduism, Tradition, and Religious Studies. Denpasar-Bali: UNHI-Hindu University of Indonesia; 10 Maret 2018.
3. **Budiwanti E.** Challenging ancestral tradition: Wetu Telu and the Orthodox Movement in Lombok. Makalah disampaikan dalam 8th IIF-International Indonesia Forum Conference. Universitas Negeri Surakarta; 29–30 Juli 2015.
4. **Budiwanti E.** Religious pluralism: Adat and localised Islam in Lombok. Makalah disampaikan dalam panel Cultural Display in Bali and Lombok. Vienna Austria: EuroSEAS Conference; 11–15 Agustus 2015.
5. **Budiwanti E.** Intangible Islamic heritage: Wali epic journey and keramat. Makalah disampaikan dalam 20th Anniversary of Studia Islamika International Conference on Southeast Asian Islam: Legacy and New Interpretation. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 14–15 Agustus 2014.
6. **Budiwanti E.** Challenging ethno-religious pluralism in Indonesia: A genuine or artificial harmony? Makalah disampaikan dalam 7th International Indonesia Forum Conference on Representing Indonesia. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung; 20 Agustus 2014.

7. **Budiwanti E.** Tuan Guru and the politics of religion in Lombok. Makalah disampaikan dalam Conference on Religious Authority, Piety and Activism: Ulama in Contemporary Muslim Societies. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 26–27 November 2014.
8. **Budiwanti E.** Interaksi antara Islam dan Budaya Sasak. Makalah disampaikan dalam Sarasehan Budaya Memperingati Hari Ulang Tahun Desa Songak, di Masjid Kuno Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur; 27 Desember 2013.
9. **Budiwanti E.** Hindu minority in muslim majority: managing ethno-religious differences in West Lombok. Makalah disampaikan dalam 6th Al-Jami'ah Forum on Minority and Plurality. State Yogyakarta: Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga; 6–8 Desember 2013.
10. **Budiwanti E.** Malaysian Indian Muslims' oscilating identity: Swinging in between home and host countries. Makalah disampaikan dalam API Regional Workshop. Penang-Malaysia; 7–8 April 2011.
11. **Budiwanti E.** Wali, masjid kuno, dan makam keramat dalam dinamika Islamisasi di Lombok. Makalah disampaikan dalam 13th AICIS-Annual International Conference on Islamic Studies. Senggigi-Lombok; 18–21 November 2013.
12. **Budiwanti E.** Etnografi dan penelitian terlibat. Makalah disampaikan dalam Workshop on Basic Anthropological Research, State Islamic University (IAIN) Mataram. Hotel Jayakarta; 17 November 2013.
13. **Budiwanti E.** Missionary movement: Contesting the Bayanese Adat of North Lombok. Makalah disampaikan dalam The International Workshop on Negotiating Inter-Religious Differences in Bali and Lombok. Germany: George-August Gottingen; 14–17 Juli 2011.
14. **Budiwanti E.** The Indian Muslims and nation building in Malaysia. Makalah disampaikan dalam API Country Workshop. Depok: Wisma Makara Universitas Indonesia; 23–24 Maret 2011.

Monograf

15. **Budiwanti E**, Pamungkas C, editor. Interaksi sosial antar etnik di daerah konflik horizontal. Jakarta: Balitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI; 2004.
16. **Budiwanti E**, Pamungkas C, editor. Penghormatan terhadap hak-hak golongan minoritas agama. Jakarta: Balitbang HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI; 2003.

Tesis

17. **Budiwanti, E.** Religion of the Sasak: An ethnographic study on the impact of islamisation on the Wetu Telu of Lombok. [Ph.D. Thesis]. [Australia]: Monash University, Department of Anthropology and Sociology; 1997.
18. **Budiwanti E.** The crescent behind the thousand holy temples: An ethnographic study of the minority muslims of Pegayaman, North Bali. [M.A. Thesis]. [Australia]: Monash University, Department of Anthropology and Sociology; 1991

Policy Paper

19. **Budiwanti E**, Pamungkas C, Wahyudi, Mudzakir, Wahyudi N. Policy Paper perlindungan pengungsi minoritas agama: Komunitas Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram. Jakarta: Penelitian Unggulan-LIPI; 2017.

Working Paper

20. **Budiwanti E.** Pluralism collapses: A study on the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and its persecution. Working Paper Series No. 117. Singapore: Asia Research Institute-National University Singapore; 2009.

Laporan Penelitian

21. **Budiwanti E**, Pamungkas C, Hakam S. Masyarakat urban dan dinamika spiritual di Korea Selatan. [Laporan Penelitian]. Jakarta: P2SDR-LIPI; 2015.

22. **Budiwanti E**, Pamungkas C, Hakam S. Ritual pasca krisis: Studi tentang praktek sosial keagamaan dalam masa pasca krisis di Korea Selatan. [Laporan Penelitian]. Jakarta: P2SDR-LIPI; 2014.
23. **Budiwanti E**. Vulnerable groups in disaster management. Laporan penelitian DIPA Projek Penelitian disaster and the structure of inequality of race and aid in the USA; 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Dr. Erni Budiwanti, M.A.
Tempat, Tgl. Lahir	: Singaraja-Bali, 28/10/1960
Anak ke-	: Satu dari Empat bersaudara
Nama Ayah Kandung	: (Almarhum) R. Pambudi
Nama Ibu Kandung	: (Almarhumah) Ni Luh Pastri
Nama Suami	: Drs. H. Saigun
Nama Anak	: 1. Nur Lazuardini Makmur, S.H. 2. dr. Nurul Hasanah Makmur 3. M. Anshori Makmur
Nama Instansi	: Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Judul Orasi	: Mengelola Keragaman Agama di Ruang Publik: Tantangan Pembangunan Negara Bangsa Indonesia
Bidang Keahlian	: Antropologi Agama
No. SK Pangkat Terakhir	: B-097/IPSK.V/KP/II/2018 (Pembina Utama Madya/IVd)
No. SK Peneliti Ahli Utama	: 0503/D.1/V/2014 (Peneliti Utama)

B. Pendidikan Formal

No	Jenjang	Sekolah/PT/Universitas	Kota/Negara	Lulus
1	SD	SD Negeri Kapas Kram-pung Wetan III,	Surabaya	1972
2	SMP	SMP Negeri IX Putro Agung	Surabaya	1975
3	SMA	SMA Negeri IX Wijaya Kusuma	Surabaya	1979
4	S1	Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga	Surabaya	1984
5	S2 (M.A)	Department of Anthropology & Sociology, Monash University	Clayton, Australia	1992
6	S3 (Ph.D)	Department of Anthropology & Sociology, Monash University	Clayton-Australia	2006

C. Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	TMT Jabatan
1.	Peneliti Muda III/c	1 Mei 2001
2.	Peneliti Madya IV/a	1 Mei 2005
3.	Peneliti Ahli Utama IV/c	1 Juni 2014
4.	Peneliti Ahli Utama IV/d	1 Maret 2018

D. Jabatan Struktural

No	Tahun	Jabatan	Instansi
1.	16 Agustus 2001–4 Mei 2009	Kepala Bidang Perkem-bangan Asia Pasifik	P2W LIPI

E. Riwayat Kepangkatan

No.	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil – III/a	31 Maret 1986
2.	Penata Muda – III/a	1 Mei 1987
3.	Penata Muda Tingkat I – III/b	7 September 1990
4.	Penata – III/c	1 April 1994
5.	Penata Tingkat I-III/d	1 Oktober 2000
6.	Pembina – IV/a	1 April 2002
7.	Pembina Tingkat I-IV/b	1 Oktober 2006
8.	Pembina Utama Muda-IV/c	1 April 2010
9.	Pembina Utama Madya-IV/d	1 April 2015

F. Keterlibatan dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No	Nama Jurnal	Penerbit	Tugas	Tahun
1	International Journal of Inter-Religious and Inter-Cultural Studies	UNHI-Universitas Negeri Hindu Indonesia, Denpasar	Editorial Board	2018–2021
2	Jurnal Harmoni	Kemenag-RI	Editorial Board	2017–2019
3	Jurnal Kajian Wilayah	Puslit Wilayah-LI-PI	Editor	2016–2018
4	Jurnal Penamas	Kemenag-RI		2018–2021

G. Karya Tulis Ilmiah

No	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	38
2.	Penulis bersama penulis lain	4
	Total	42

No	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Karya tulis dalam bahasa Inggris	25
2.	Karya tulis dalam bahasa Indonesia	17
	Total	42

H. Scholarship dan Fellowship

No	Sponsor	Program	Tahun
1	AIDAB-Australian Development Assistance Bureau Scholarship	S2, Department Anthropology and Sociology, Monash University, Australia	1989–1991
2	AusAid-Australian Agency for International Development Scholarship	S3, Department Anthropology and Sociology, Monash University, Australia	1993–1997
3	Japan Society for the Promotion of Science Visiting Research Fellowship	Visiting Research Fellowship, Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, Komaba, Japan	Januari–Maret 2002
4	Asia Research Institute, National University Singapore (ARI-NUS)	Visiting Research Fellowship di ARI-NUS	Maret–Juni 2009
5	The Nippon Foundation's Association of Public Intellectual (API) Fellowship.	Research Fellowship di Malaysia	Agustus 2009–Juli 2010

I. Profesi Ilmiah

No	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1	Anggota	Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) LIPI	1985–2001
2	Anggota	Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)	2015–2016

J. Tanda Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya XX	Presiden Republik Indonesia	2007
2	Satyalancana Karya Satya XXX	Presiden Republik Indonesia	2016
3	Makalah Terbaik dalam Annual International Conference on Islamic Studies AICIS XIII, IAIN Mataram	Kemenag RI dan IAIN Mataram	2013



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

DOI: 10.55981/brin.637



ISBN 978-623-7425-99-1



9 786237 425991

Buku ini tidak diperjualbelikan.